

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan politik negeri Belanda terhadap negeri jajahan pada awal abad ke-20 mengalami perubahan. Berkuasanya kaum liberal di parlemen Belanda turut menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan. Kaum liberal yang mengusung kebebasan dan persamaan derajat menginginkan agar negeri jajahan diberikan kesejahteraan. Dalam hal ini Hindia-Belanda sebagai negeri jajahan Belanda agar untuk turut diberikan kesejahteraan.

Berkuasanya kaum liberal, memunculkan banyak tokoh yang merubah dan mempengaruhi kebijakan Belanda di Hindia-Belanda. Berubahnya kebijakan Belanda terhadap Hindia-Belanda tidak lepas dari peranan para tokoh tersebut. Mereka antara lain Van Deventer, P. Brooshoft, dan Van Limburg Stirum.¹ Para tokoh tersebut menciptakan pemikiran baru terhadap negeri jajahan yang di Hindia Belanda dikenal dengan politik etis.

Pada dasarnya selama ini politik etis bermula dari tulisan Van Deventer yang berjudul “*Een Ereschuld*”(Hutang Budi), yang dimuat dalam majalah *De Gids* pada

¹ Dalam bukunya Elsbeth Locher Scholten, *Etika yang Berkeping-keping*. Terj.Nicolette P. Ratih, Jakarta: Djambatan, 1996.dijelaskan bahwa para tokoh ini, terutama P. Brooshoft dan Limburg Stirum, memegang peranan penting dalam terciptanya politik etis di Hindia Belanda dan implikasi dari politik etis yang dijalankan oleh Limburg Stirum.

tahun 1901. Tulisan tersebut menghimbau pemerintah Belanda untuk membuat perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang berkekurangan itu sebagai bagian ganti rugi akan laba yang sudah dikeruk Belanda dari Jawa melalui Sistem Tanam Paksa. Sejak tahun 1900, menurut Van Deventer jumlah tersebut hampir dua ratus juta dollar.² Ia menuntut restitusi berjuta-juta uang yang diperoleh negeri Belanda sejak berlakunya undang-undang *Comptabiliteit* pada tahun 1867.³

Kemudian pada tahun 1901, wartawan Hindia P. Brooshooff, menyatakan dalam brosurinya *De ethische koers in de koloniale politiek* (arah kebijakan politik etis dalam politik kolonial), yang menyediakan sebutan “ethische politik”: Apa yang harus mendorong kita untuk menunaikan kewajiban ialah sifat manusia yang terbaik yaitu rasa keadilan, perasaan bahwa kita harus memberikan kepada orang Jawa, yang telah menjadi bergantung pada kita bertentangan dengan kehendaknya sendiri, yang terbaik yang kita miliki baginya, yaitu hasrat mulia orang kuat untuk memperlakukan yang lemah dengan adil. Dengan alasan tersebut ia menganjurkan berbagai usaha untuk menguatkan keadaan ekonomi ‘orang Jawa’ dengan tidak mengabaikan keinginan politik golongan penduduk Eropa di Hindia-Belanda.⁴

Pemilihan Umum tahun di negeri Belanda 1901 mengubah gambaran politik di negeri tersebut. Partai Liberal yang yang menguasai politik selama lima puluh tahun telah keluar dari arena politik, dan sibuk dengan kitab tuntunan dan agama,

² Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Terj. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984. hal. 21

³ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.1999. hal. 32.

⁴ Elsbeth Locher Scholten. *Op Cit.* hal. 239

telah membuat kelompok kanan dan kelompok agama berkoalisi. Kedua kelompok tersebut menetapkan untuk kembali kepada prinsip-prinsip Kristen dalam pemerintahan. Pidato tahunan kerajaan bulan September 1901 telah menunjukkan semangat Kristen ketika Ratu berkata tentang suatu “kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia-Belanda”. Pesan kerajaan tersebut dilanjutkan dengan menyatakan keprihatinan terhadap keadaan ekonomi yang buruk di Hindia Belanda dan meminta agar dibentuk suatu komisi untuk memeriksa keadaan ini. Berdasarkan pidato Ratu tersebut diberlakukanlah Politik Etis di Hindia-Belanda.⁵

Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip dasar kebijakan baru tersebut: edukasi, emigrasi, dan irigasi (pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan). Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan adanya dana. Oleh karena itulah, maka hutang pemerintah kolonial yang mencapai sekitar 40 juta *gulden* diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran uang tanpa harus dibebani hutang lagi, dan Politik Etis mulai berjalan.⁶

Mengenai pengertian Politik Etis terdapat banyak pendapat. Dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia* jilid V dijelaskan bahwa Politik Etis adalah politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, serta efisiensi.⁷ Pengertian Politik Etis sendiri menurut Elsbeth Locher Scholten adalah: kebijakan

⁵ Robert Van Niel. *Op Cit*, hal. 51

⁶ M.C Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia*. Terj. Drs. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta:Gajah Mada University Press. 1991. hal. 228

⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V. Jakarta, Balai Pustaka 1993. hal. 35

yang bertujuan melebarkan kekuasaan nyata Belanda atas seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan mengembangkan negeri dan bangsa wilayah ini menuju pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Belanda dan menurut model barat.⁸

Selain itu Elsbeth Locher Scholten juga membagi masa Politik Etis menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Pada Periode 1894-1905, yang mendapat tekanan ialah menanamkan kekuasaan persiapan pengembangan negeri dan bangsa.
- b. Periode 1905-1920 merupakan zaman kebesaran karya pembangunan, yang bayangannya seolah menutupi pemantapan kekuasaan yang terselesaikan pada waktu yang bersamaan.
- c. Periode 1920-1942, periode konsolidasi dan pergeseran tekanan, yaitu masa Politik Etis yang konservatif.⁹

Dengan adanya Politik Etis inilah maka dimulailah zaman pergerakan yang didalamnya terdapat berbagai macam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi baik dari negara Belanda maupun pemerintah Hindia-Belanda.

Sedangkan untuk menjaga kepentingan modalnya di Hindia Belanda, Belanda menempuh suatu politik yang mengambil sikap berdamai dengan gerakan emansipasi yang hendak mewujudkan aspirasi nasional, suatu kebijakan politik yang terkenal dengan nama politik asosiasi dan diharapkan oleh kaum Etisi dapat memperkuat

⁸ Elsbeth Locher Scholten, *Op Cit*, hal. 270

⁹ *Ibid* hal. 277

sistem kolonial.¹⁰ Asosiasi disini menghendaki kebudayaan kota dapat memakmurkan dan mensejahterakan penduduk di masa depan mereka, termasuk kecenderungan untuk menghargai kebudayaan asli dan tidak menghendaki pemaksaan perubahan.¹¹ Politik asosiasi ini membentuk kaum asosiasionis yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan golongan agama.¹²

Dasar dari politik asosiasi ini adalah persatuan dan koperasi di antara golongan-golongan yang berbeda-beda di dalam masyarakat kolonial. Cita-cita kaum asosiasionis menghendaki supaya penjajah dan yang dijajah itu bertindak sebagai teman, sehingga semua rintangan yang berupa perbedaan ras akan dapat dilenyapkan.¹³ Tujuan politik asosiasi hendak menyalurkan faham-faham dalam dunia pribumi dan menjembatani faham yang berlawanan, tiruan atau penyesuaian. Masyarakat Hindia-Belanda perlu berlandaskan pada persamaan kedudukan dan saling hormat-menghormati.¹⁴ Untuk itu dibutuhkan suatu ikatan yang kuat, yang hanya dapat diwujudkan kalau kekuasaan Belanda tetap kuat. Menurut kaum asosiasionis adalah tugas negeri Belanda untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban serta menghormati pemerintah.¹⁵

Jadi dapat dikatakan politik asosiasi adalah politik konservatif pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya untuk mempertahankan kebudayaan-kebudayaan

¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *Op. Cit*, hal. 39.

¹¹ Robert Van Niel. *Op. Cit*, hal.59

¹² Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit*, hal. 50.

¹³ *Ibid*, hal. 51

¹⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *Op. Cit*, hal. 64.

¹⁵ Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit*, hal. 51.

Belanda dan perluasan pengajaran bahasa Belanda. Dengan kata lain politik asosiasi tidak lain hanya merupakan ideologi yang dipakai untuk membenarkan hubungan kolonial antara Belanda dan pribumi Indonesia dan mempertahankan status quo.¹⁶

Perwujudan dari politik asosiasi ini adalah dengan dibentuknya *Politieke Economische Bond* (PEB). Tujuannya ialah berkoperasi secara harmonis dengan rakyat Indonesia untuk membangun suatu bangsa Indonesia dengan jalan memelihara kepemimpinan Belanda yang dianggap perlu sekali bagi keuntungan semua golongan bangsa sebagai kesatuan. Dengan demikian PEB menentang “ Bebas dari Holland” dan pergerakan nonkoperatif. Pada prinsipnya PEB tidak menghendaki demokrasi yang murni dengan hak-hak yang sama; dengan demikian berarti membantu ide perwalian atau bimbingan.¹⁷

PEB didirikan pada tanggal 25 Januari 1919 sebagai reaksi terhadap tindakan-tindakan dan haluan umum dari pemerintah Hindia Belanda yang dipandang terlalu maju, terlalu etis.¹⁸ Dalam PEB terdapat tokoh-tokoh dari berbagai agama, golongan etis dan ras serta berbagai haluan. Orientasi politik kanan dan kiri tergabung di dalamnya. Dasarnya adalah pimpinan Belanda yang kokoh dan yang perlu dipertahankan di antara berbagai golongan penduduk.¹⁹ PEB adalah partai asosiasi Belanda. Tujuannya untuk mewujudkan suatu bangsa Hindia dengan jalan koperasi

¹⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *Op. Cit*, hal. 66.

¹⁷ Sartono Kartodirdjo. *Op. Cit*, hal. 254.

¹⁸ A.K Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1994.hal.15.

¹⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *Op. Cit*, hal. 65.

dengan rakyat pribumi di bawah pimpinan Belanda. PEB didirikan oleh A. J. N. Engelenberg dan didanai oleh sindikat gula.²⁰

Buku-buku atau penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang sejarah organisasi politik PEB, masih sangat minim dilakukan oleh peneliti Indonesia. Namun, para peneliti asing, umumnya dari negeri Belanda mengetahui dengan baik tentang masa pergerakan. Dalam buku *Semangat Berkobar* Hans Van Miert²¹, menjelaskan tentang Boedi Oetomo. Penjelasan tentang PEB terdapat sebagian kecil dan secara terpisah. Sedangkan dalam buku yang membahas Sejarah Indonesia seperti *Sejarah Nasional Indonesia* jilid V oleh Marwati Djoened dan Nongroho Notosusanto dan *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* oleh Sartono Kartodirdjo hanya menjelaskan tentang masa pergerakan secara keseluruhan dan umumnya membahas pergerakan nasional. Mengenai PEB hanya dibahas hanya sedikit berupa pengertiannya saja. Dalam buku *Etika yang Berkeping-keping* oleh Elsbeth Lochter Scholten²² dijelaskan secara lengkap mengenai masa 1900-1942 yang merupakan masa politik etis. Buku ini membahas tentang periode tersebut berdasarkan tokoh-tokoh Belanda dan surat kabar Belanda. Oleh karena itulah peneliti ingin melihat jaman pergerakan yang tidak hanya diwarnai oleh para nasionalis kebangsaan tetapi juga dari kepentingan pemerintah kolonial, sehingga nantinya terdapat pemahaman

²⁰ Takashi Shiraishi. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Terj. Hilmar Farid, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995. hal. 292.

²¹ Hans van Miert. *Dengan Semangat Berkobar : Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918 – 1930*. Terj. Sudewo Satiman, Jakarta : Hasta Mitra dan Utan Kayu. 2003

²² Elsbeth Lochter Scholten, *Etika yang Berkeping-keping*. Terj. Nicolette P. Ratih, Jakarta: Djambatan, 1996

yang mendalam tentang jaman pergerakan dan kegiatan yang terjadi didalamnya khususnya mengenai kegiatan PEB.

Umumnya penelitian mengenai jaman pergerakan telah banyak ditulis oleh para sejarawan, namun penelitian mengenai PEB masih sedikit kalau tidak bisa dikatakan tidak ada. Penelitian mengenai PEB memang terdapat di negeri Belanda tetapi penulis kiranya kesulitan mendapatkan sumbernya. Contohnya adalah penulis kesulitan menemukan buku-buku yang menceritakan tentang masa pergerakan yang ditulis oleh para peneliti Belanda dan diterbitkan di Belanda. Buku tersebut antara lain *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlands-Indie* dari Van der Wall.²³

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan organisasi *Politike Economische Bond* dari tahun 1919-1931? PEB dipilih karena mewakili perkumpulan campuran dan mewarnai sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Adapun permasalahan tersebut akan dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana PEB berdiri?
2. Bagaimana perjuangan PEB antara tahun 1919-1931?
3. Bagaimana hubungan PEB dengan masyarakat Hindia Belanda?

²³ Van Der Wall. *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlands-Indie*. Groningen: JB Wolters. 1964 dan 1965

Dengan mengetahui berdirinya, tujuan, dan kegiatan PEB diharapkan dapat menjelaskan mengenai suasana politik pada masa pergerakan. PEB sebagai perkumpulan politik campuran tidak menginginkan Indonesia merdeka, melainkan hanya diberikan pemerintahan sendiri namun tetap dalam negeri Belanda. Dengan mengetahui PEB kita dapat mendapatkan suatu pandangan mengenai masa pergerakan tidak hanya dari sisi kaum nasionalis saja. Terdapat juga kepentingan orang Belanda pada masa ini di Hindia-Belanda.

C. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan permasalahan tidak terlalu melebar dan lebih fokus, baik secara tematis, temporal, maupun spasial.

Secara tematis penelitian ini menekankan pada latar belakang berdirinya PEB, dan perkembangannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PEB selama organisasi ini berdiri akan menjadi fokus penelitian. Secara temporal, penulis memilih tahun 1919 dimana terbentuknya PEB di Hindia Belanda dan diakhiri pada tahun 1929 dikarenakan pada saat itu kedudukan PEB di masyarakat sudah mulai melemah setelah ditinggal pemimpinya Engelenberg yang pulang ke negeri Belanda dan menurunnya jumlah anggota PEB dalam masyarakat.

Secara geografis penelitian ini mengambil tempat Hindia Belanda secara keseluruhan dan pulau Jawa khususnya. Karena pada masa pergerakan segala

aktivitas kehidupan berpusat di Jawa. Selain itu juga karena PEB memiliki cabang terbanyak di pulau Jawa, walaupun juga terdapat cabang di luar Jawa, namun kegiatan-kegiatan PEB terpusat di Jawa.

D. Tujuan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang organisasi *Politieke Economische Bond* (PEB). Apa itu PEB, kapan berdirinya dan bagaimana kegiatannya di Hindia Belanda.

Hal ini sangat menarik karena pada masa pergerakan ternyata tidak hanya terdapat perkumpulan bangsa Indonesia, namun juga terdapat perkumpulan campuran seperti PEB. Dengan demikian dapat dilihat bahwa jaman pergerakan tidak hanya dijadikan momen untuk kelompok kebangsaan tetapi juga dari segolongan kelompok yang memiliki kepentingan di Hindia Belanda. Kepentingan itu berupa menghendaki satu pemerintahan sendiri yang terpisah dari negeri Belanda tetapi masih dalam wilayah Belanda. PEB sebagai suatu perkumpulan campuran yang besar diantara perkumpulan campuran lain pada masa pergerakan menjadi suatu topik yang menarik untuk dibahas. Pendirian PEB disini merupakan salah satu kepentingan dari pemerintah kolonial untuk mempertahankan jajahannya terhadap Hindia-Belanda.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder. Penulis memakai sumber-sumber terutama yang berkaitan dengan PEB. Diantara sumber-sumbernya adalah sumber-sumber yang terdapat dalam arsip pemerintah kolonial Hindia Belanda, surat kabar yang terbit pada masa pergerakan terutama surat kabar yang dimiliki oleh PEB, dan juga dari buku-buku yang memuat tentang jaman pergerakan terutama yang berkaitan dengan PEB.

Untuk menunjang kegiatan operasional, penelitian ini melalui empat tahap penelitian yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Tahap awal dari metode penelitian ini adalah heuristik, dimana peneliti akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta yang mendukung penelitian ini, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang dipakai pada penelitian ini adalah berupa koleksi koran dan majalah sejaman baik dari terbitan pemerintah Belanda maupun dari terbitan kaum nasionalis yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sumber tersebut antara lain *Orgaan Van Nederlandsche Indies Politieke Economische Bond* berupa majalah dwi mingguan milik PEB, *Neratja* berupa surat kabar harian milik kaum pergerakan, *de Indische Gids* berupa majalah milik pemerintah, *Sinar Hindia* berupa surat kabar milik kaum komunis, *Boedi Oetomo* berupa surat kabar milik organisasi Boedi Oetomo, dan sebagainya. Selain menggunakan sumber primer, penulis juga menggunakan sumber sekunder mengenai situasi politik pada masa pergerakan seperti *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* oleh A. K. Pringgodigdo, *SNI jilid V* oleh Marwati Djoened dan

Nugroho Notosusanto, dan sebagainya. Penulisan tentang PEB umumnya sangat minim sehingga penulis lebih mencari data-data dengan membaca koran dan majalah sejaman.

Proses selanjutnya adalah kritik, kritik yang dilakukan adalah kritik ekstern dan intern terhadap data-data yang penulis dapatkan melalui buku, majalah dan koran sejaman. Dengan adanya kritik intern dan ekstern peneliti dapat memperoleh isi yang benar dari sumber yang penulis dapatkan. Apakah sumber-sumber tersebut layak digunakan dan dijadikan bahan penelitian.

Tahap interpretasi adalah tahap dimana penulis mampu memberikan pandangannya terhadap data-data yang didapat setelah melalui proses kritik. Dalam melakukan interpretasi, penulis juga menggunakan konsep-konsep dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi dengan mempelajari sedikit teori-teori dari ilmu tersebut.

Tahap akhir dari penulisan ini adalah tahap historiografi yang merupakan tahap dimana fakta yang dikumpulkan dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Fakta-fakta tersebut haruslah ditempatkan pada tempatnya dan setelah melalui proses kritik dan interpretasi disusun secara kronologis sehingga bisa menceritakan organisasi politik PEB khususnya antara tahun 1919-1931 secara faktual dan komprehensif.

F. Sumber Sejarah

Dalam penulisan sejarah, data yang digunakan didapat dari dua macam sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Tentunya untuk memberikan kredibilitas yang kuat terhadap penelitian ini, penulis harus menyertakan sumber primer sebagai data sumber. Sumber primer yang berupa koran dan majalah sejaman penulis dapatkan di Perpustakaan Nasional.

Sumber-sumber primer yang penulis dapatkan umumnya berupa koran dan majalah sejaman yang antara lain: *Overzicht van Inlandsche Malaysche en Chinese Pers*, berupa ikhtisar surat kabar di Hindia-Belanda tahun 1919-1931. *Orgaan van Nederlandsch Indie Politieke Economische Bond 1920-1928*, berupa majalah dwi mingguan dari PEB, di dalamnya memuat tentang aktifitas PEB. *Politieke Economische Bond de Nederlandsch Indie Associatie Partij no.2 1929 – no.4 1929*. Merupakan buku saku yang memuat program PEB. *Orgaan van Nederlandsch Indie Politieke Economische Bond 1929* yang berupa mikro film koleksi Perpustakaan nasional Republik Indonesia. Selain itu juga terdapat surat kabar masa pergerakan seperti *Neratja*, *Sinar Hindia*, *De Indische Gids*, dan *Oetoesan Hindia*. Semua bahan-bahan tersebut penulis dapatkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Selain menggunakan sumber primer, penulis juga menggunakan sumber sekunder sebagai pendukung dari penelitian ini. Penulis menggunakan bahan bacaan yang penulis dapatkan dari UPT Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Fakultas Ilmu-Pengetahuan Budaya) FIB UI, perpustakaan *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-*

en Volkenkunde (KITLV) perwakilan Indonesia, dan Miriam Budiardjo Research Center.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Partai Politik Campuran di Hindia Belanda *Politieke Economische Bond* (1919-1931)”, terdiri atas lima bab. Bab pertama adalah berupa pendahuluan skripsi yang memuat tentang latar belakang tema, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, metode, sumber, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan gerakan nasional pada awal abad ke-20 yang mewarnai panggung politik di Hindia Belanda. Pembagian pergerakan nasional menurut golongan kebangsaan, agama, dan golongan Eropa. Dijelaskan juga mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada masa tersebut.

Bab tiga menceritakan tentang sejarah lahirnya PEB dan tujuan berdirinya organisasi tersebut. Dijelaskan pula mengenai aliran politik PEB, struktur organisasi, keanggotaan PEB, dan cabang-cabang yang dimiliki PEB.

Bab keempat menguraikan perjalanan PEB dari tahun 1919-1931. Bab ini juga menjelaskan mengenai keanggotaan PEB dalam *volksraad*. Usaha-usaha yang dilakukan PEB dan propaganda PEB dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan. Selain itu juga diuraikan hubungan antara PEB dengan masyarakat Hindia Belanda baik dari golongan pribumi maupun kaum priyayi. Sedangkan bab lima memberikan kesimpulan dan sekaligus sebagai penutup dari semua bab.